



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**(BPMP2T) KOTA BALIKPAPAN**



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA**  
**INSTANSI PEMERINTAH**  
**KOTA BALIKPAPAN**  
**TAHUN 2013**



## KATA PENGANTAR


Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Tahun 2013 dapat diselesaikan.

Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) BPMP2T Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016.

Dengan telah tersusunnya LAKIP BPMP2T Kota Balikpapan Tahun 2013 ini, disampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak dan yang telah banyak membantu pelaksana-pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2013.

Penyusunan LAKIP BPMP2T Kota Balikpapan Tahun 2013 ini telah diupayakan seoptimal mungkin, meskipun demikian masih terdapat kekurangan-kekurangan yang disebabkan adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Semoga LAKIP BPMP2T Kota Balikpapan Tahun 2013 ini dapat bermanfaat.

Balikpapan, 27 Pebruari 2014  
Kepala Badan Penanaman Modal dan  
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan,

  
**NINING SURTININGSIH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590404 198302 2 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	1
C. ASPEK STRATEGIS .....	2
D. STRUKTUR ORGANISASI .....	3
E. SISTEMATIKA PENULISAN .....	4
<b>BAB II</b> <b>RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA .....</b>	<b>6</b>
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) .....	6
1. VISI DAN MISI .....	7
2. TUJUAN DAN SASARAN .....	8
3. STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM .....	10
4. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013 .....	11
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .....	11
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 .....	12
<b>BAB III</b> <b>AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>15</b>
A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA .....	15
B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	19
<b>BAB IV</b> <b>PENUTUP .....</b>	<b>22</b>
A. KESIMPULAN .....	22
B. SARAN .....	23

### LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. SK. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU);
2. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013;
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan selama Tahun 2013. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2013 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Tahun 2013 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

*Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Tahun 2013 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 3 (tiga) sasaran.*

Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Tahun 2013 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya “Good Governance” merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya. Pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Pembentukan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Dimana BPMP2T Kota Balikpapan adalah badan pelayanan yang secara operasional menyelenggarakan tugas perizinan dan non perizinan pada suatu tempat maupun satu pintu serta melakukan promosi dan pengembangan investasi di daerah.

### **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2009, disebutkan bahwa tugas pokok BPMP2T Kota Balikpapan adalah merupakan badan pelayanan yang secara operasional melaksanakan pengoordinasian pelayanan beberapa jenis perizinan dan non perizinan pada satu tempat maupun satu pintu serta melakukan promosi dan pengembangan investasi di daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal, peningkatan pelayanan perizinan terpadu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Kota;
2. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan sesuai kewenangannya;
4. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

### **C. ASPEK STRATEGIS**

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016 telah menetapkan 8 isu strategis yang menjadi dasar perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan 5 tahun kedepan, yaitu :

1. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana serta pelayanan bidang pendidikan yang menunjang terwujudnya Balikpapan sebagai kota vokasi.
2. Belum optimalnya sistem jaminan kesehatan mandiri masyarakat.
3. Masih rendahnya penumbuhan ekonomi kreatif kota.
4. Belum optimalnya upaya pencegahan degradasi lingkungan hidup.
5. Masih rendahnya penyediaan dan pengelolaan infrastruktur serta penataan kota.
6. Masih adanya masyarakat miskin dan pengangguran.
7. Belum optimalnya penyelenggaraan manajemen pemerintahan kota.
8. Belum efektif dan efisiennya pengelolaan keuangan daerah.

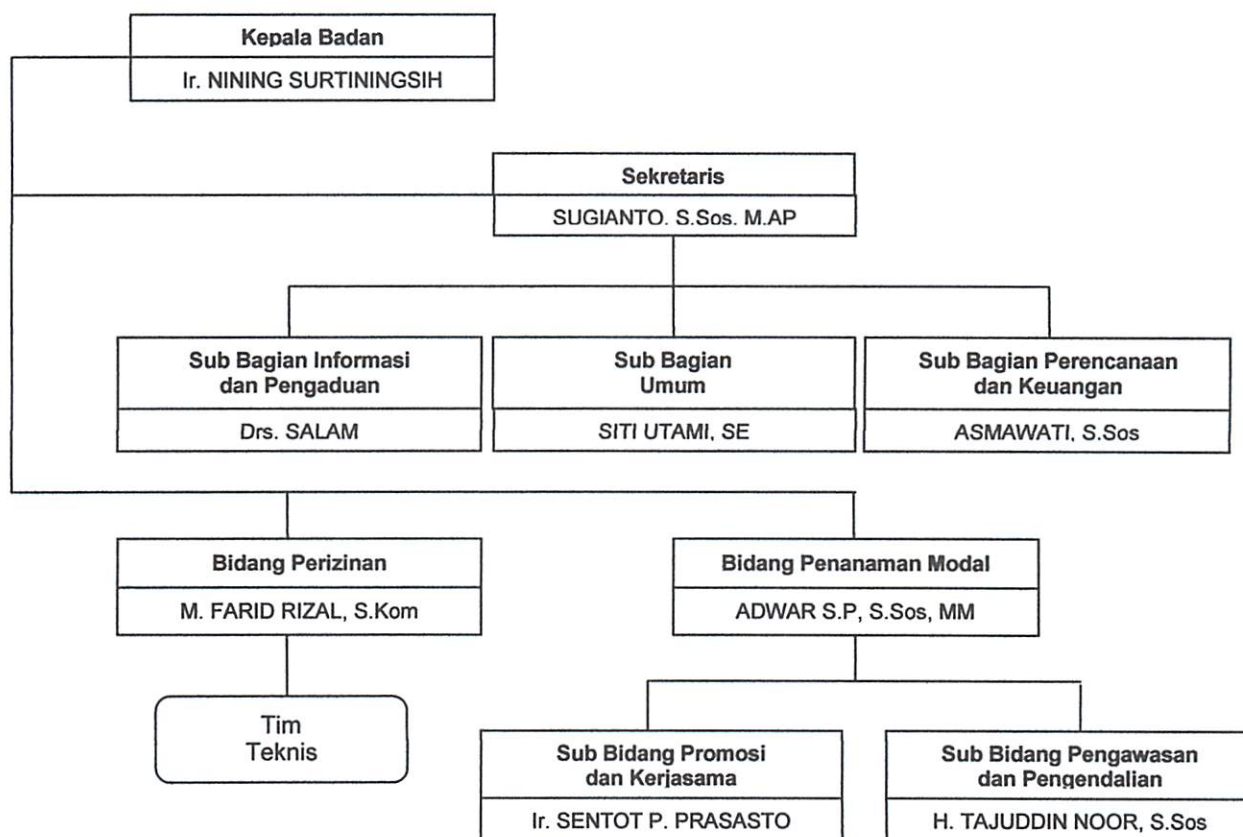
Untuk mendukung keseluruhan 8 isu strategis, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan melaksanakan 8 program prioritas yang termasuk dalam urusan wajib, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
4. Program Peningkatan Promosi Investasi.
5. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.
6. Program Peningkatan Pengembangan dan Pengawasan Investasi.
7. Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi.
8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

#### D. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun struktur organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan sebagai berikut :

Gambar 1 Struktur Organisasi BPMP2T Kota Balikpapan



Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan tersebut, secara struktur organisasi BPMP2T dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh :

1. Sekretaris yang membawahi :
  - Sub Bagian Umum;
  - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - Sub Bagian Informasi dan Pengaduan.
2. Bidang Penanaman Modal yang membawahi :
  - Sub Bidang Promosi dan Kerjasama;
  - Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
3. Bidang Perizinan :
  - Tim Teknis
4. Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dibentuk Tim Teknis.
5. Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Balikpapan.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan LAKIP ini adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

**BAB I           PENDAHULUAN**

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
- C. ASPEK STRATEGIS
- D. STRUKTUR ORGANISASI
- E. SISTEMATIKA PENULISAN

**BAB II           RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA**

- A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
  1. VISI DAN MISI
  2. TUJUAN DAN SASARAN
  3. STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM
  4. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013

- B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
- C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA
- B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

BAB IV PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. SK. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU);
2. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013;
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013.

**BAB II**  
**RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA**

**A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka seluruh penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah dari eselon III dan Eselon II ke atas wajib menetapkan/merumuskan perencanaan strategis yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, yang mengacu kepada RPJMD dan Visi Misi Kota Balikpapan dan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi terhadap kebijakan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Balikpapan.

Sumber Daya Manusia merupakan peran kunci untuk menjalankan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan. Ketersediaan sumber daya manusia dengan jumlah yang memadai serta pengetahuan dan keterampilan yang handal akan menjamin kelancaran roda organisasi. Untuk mewujudkan terlaksananya pencapaian tugas-tugas tersebut, sampai dengan akhir bulan Desember 2013 jumlah pegawai pada BPMP2T Kota Balikpapan sebanyak 65 (enam puluh lima) orang. Guna mendapatkan gambaran yang secara lengkap mengenai komposisi Pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Balikpapan keadaan akhir tahun 2013, sebagai berikut :

Tabel 1  
Komposisi Pegawai BPMP2T Kota Balikpapan

Jabatan	Pangkat/Golongan				Sub Total	Pendidikan						Jenis Kelamin	
	IV	III	II	I		S-2	S-1	Dpl	SMA	SMP	SD	L	P
Kepala Badan	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
Sekretaris	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-
Kepala Bidang		2	-	-	2	1	1	-	-	-	-	2	-
Ka. Sub Bagian	-	3	-	-	3	-	3	-	-	-	-	1	2
Ka. Sub Bidang	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	-
Staf Pelaksana	-	5	21	2	28	-	4	4	18	-	2	14	14
<b>Jumlah PNS</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>37</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>17</b>
<b>Jumlah THL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Nabab</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>9</b>
<b>Jumlah Total</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>65</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>34</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>\$</b>	
<b>Jumlah Total</b>	<b>65 Orang</b>												

Perencanaan yang strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sekaligus menjawab masalah serta tantangan pada BPMP2T Kota Balikpapan, maka Rencana Strategis (Renstra) BPMP2T Kota Balikpapan perlu disusun dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja BPMP2T Kota Balikpapan. Dengan dirumuskannya rencana strategis ini, maka BPMP2T Kota Balikpapan sebagai salah satu unit kerja Eselon II B telah menetapkan arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan masa mendatang dengan pemahaman dan respon serta kerjasama dari semua dinas, badan, lembaga teknis daerah dan stakeholder lainnya.

## 1. VISI DAN MISI

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibina dan berkembang agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang kerangka masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah dengan mengacu pada batasan tersebut.

Dengan memperhatikan Visi Walikota Balikpapan Periode Tahun 2011-2016 yaitu : **“MEWUJUDKAN KOTA BALIKPAPAN NYAMAN DIHUNI MENUJU MADINATUL IMAN”** dengan tetap memegang komitmen, tanggung jawab, jujur, kerja sama, disiplin, terampil, produktif dan terbuka, maka BPMP2T Kota Balikpapan menetapkan visi organisasi Tahun 2011-2016 yaitu : **“TERWUJUDNYA PELAYANAN PERIZINAN PRIMA MENUJU IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF.”**

Misi dapat didefinisikan sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan untuk

memenuhi visi tersebut, BPMP2T Kota Balikpapan memiliki misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan yang prima dengan mengutamakan responsivitas, rensponsibilitas, akuntabilitas, transparan dan kredibel;
- b. Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, investasi dan kerjasama investasi;
- c. Mewujudkan tertib administrasi keuangan, sumber daya manusia (SDM) dan perkantoran.

## 2. TUJUAN DAN SASARAN

BPMP2T Kota Balikpapan menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan dan sasaran strategis yang diterapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan yang prima dan dengan empati BPMP2T memberikan pelayanan yang tepat, pasti dan transparan.

Sasaran :

- Penyusunan peraturan daerah yang mengakomodir penyelenggaraan perizinan, sehingga dapat memberikan kepastian dan transparansi kepada masyarakat;
- Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang prima, memuaskan dan optimal dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
- Pelaksanaan mekanisme dan sistem pelayanan perizinan yang berbasis teknologi informasi (IT).

- b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap investasi dan perizinan.

Sasaran :

- Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian terhadap 160 kegiatan investasi per tahun yang dilakukan secara berkesinambungan;
- Terselenggaranya fasilitasi investasi terhadap 104 kegiatan usaha per tahun sehingga dapat menciptakan dunia usaha yang semakin kompetitif;

- Teridentifikasinya potensi investasi dari hasil pengawasan dan pengendalian;
  - Terciptanya kondusivitas iklim usaha yang menjadi daya tarik atau nilai tambah bagi optimalisasi kerjasama investasi bagi optimalisasi kerjasama investasi sehingga nilai dan investasi yang masuk semakin meningkat dan berkualitas.
- c. Mengembangkan promosi potensi dan kerjasama investasi Kota Balikpapan.

Sasaran :

- Terwujudnya 10 kader (duta) investasi sebagai bagian dari promosi potensi dan kerjasama investasi yang mempromosikan sektor/produk unggulan daerah;
  - Penyelenggaraan promosi potensi dan kerjasama investasi yang optimal dengan jenis promosi yang kreatif dan inovatif yang dapat memenuhi dan memperkokoh ekspektasi dunia usaha;
  - Mewujudkan kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah;
  - Pelaksanaan promosi potensi dan kerjasama investasi dengan hasil yang maksimal sehingga dapat menjadi tolak ukur keberhasilan promosi dan dapat menjadi acuan terhadap kesinambungan promosi.
- d. Meningkatkan jumlah realisasi investasi.

Sasaran :

- Peningkatan realisasi investasi dengan target 25 % per tahun;
  - Identifikasi jumlah dan jenis investasi.
- e. Meningkatkan administrasi keuangan, SDM dan perkantoran.

Sasaran :

- Tertib administrasi perkantoran dan tertib pengelolaan keuangan;

- Pelaksanaan mekanisme kerja yang menggambarkan sistem manajemen kinerja dengan responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas dan transparansi;
- Sistem informasi manajemen pelayanan secara terukur dalam bidang penanaman modal, perizinan dan sekretariat;
- Pembentukan sumber daya aparatur yang profesional dan kompeten, serta memiliki kompetensi dalam bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

### **3. STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM**

#### **a. Strategi kebijakan**

- Mengkaji ulang perumusan kebijakan daerah menyangkut pelayanan publik dan menyelaraskan dengan kondisi terkini;
- Meningkatkan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik serta pelayanan pada investor;
- Meningkatkan pelayanan investasi dan kualitas pelayanan publik;
- Meningkatkan pengendalian dan pengawasan dunia usaha sehingga tercipta dunia usaha yang kompetitif;
- Menyusun rencana penegakan disiplin aparatur, peningkatan etos dan budaya kerja.

#### **b. Program**

- Pembinaan dan pengawasan dunia usaha dan investasi;
- Pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan serta penerbitan perizinan;
- Meningkatkan kualitas aparatur;
- Menindaklanjuti regulasi aturan pemerintah pusat dan menyelaraskan dengan kondisi di daerah.

#### 4. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013

Rencana kinerja tahunan meliputi Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif BPMP2T Kota Balikpapan berpedoman pada indikasi rencana program prioritas, kebutuhan pendanaan, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Balikpapan. Adapun Rencana Kinerja Tahunan BPMP2T Kota Balikpapan Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 2  
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Peningkatan Invetasi	Jumlah Investor	75 Unit Usaha
		Persentase Realisasi Investasi	85 %
		Jumlah Persentase Keluhan Investor	10 %
		Frekuensi Promosi Investasi	15 Event
2	Sistem Pelayanan Investasi Berbasis IT	Pelayanan SPIPISE	25 %
3	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jumlah permohonan izin	8.450 Pemohon
		Persentase penyelesaian izin	95 %
		Persentase keluhan pembuatan izin	2 %
		Pengembangan pelayanan perizinan berbasis IT	40 %

#### B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Selain itu indikator kinerja utama juga diperlukan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel 3

## Indikator Kinerja Utama BPMP2T Kota Balikpapan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN/ SUMBER DATA
1	2	3	4
1.	Peningkatan Investasi	Jumlah Investor	Bid. Penanaman Modal
		Persentase Realisasi Investasi	Bid. Penanaman Modal
		Persentase Keluhan Investor	Bid. Penanaman Modal
		Frekuensi Promosi Investasi	Bid. Penanaman Modal
2.	Sistem Pelayanan Investasi Berbasis IT	Pelayanan SPIPISE	Bid. Penanaman Modal
3.	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jumlah Pemohon Izin	Bidang Perizinan
		Persentase Penyelesaian Izin	Bidang Perizinan
		Persentase Keluhan Pembuatan Izin	Bidang Perizinan
		Pengembangan Pelayanan Perizinan Berbasis IT	Bidang Perizinan

**C. PENETAPAN KINERJA**

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Peraturan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kebijakan ini memperkuat perencanaan kinerja pada instansi pemerintah pada berbagai tingkatan di pusat dan didaerah sebagai perwujudan penerapan manajemen kinerja dalam rangka mewujudkan *good governance* pada penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Dokumen Penetapan Kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen penetapan kinerja disusun setelah ada kejelasan mengenai alokasi anggaran. Hal ini dimaksudkan agar dokumen penetapan kinerja dapat disusun secara lebih realistis dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber dana.

Dalam kaitannya dengan penerapan perjanjian kinerja atau kontrak kinerja atau dokumen penetapan kinerja (Tapkin), Kepala BPMP2T Kota

Balikpapan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan membantu dalam pengukuran kinerja BPMP2T Kota Balikpapan.

Adapun penetapan kinerja BPMP2T Kota Balikpapan Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 4

Penetapan Kinerja BPMP2T Kota Balikpapan Tahun 2013

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Program	Kegiatan
		Uraian	Target		
1	Peningkatan Invetasi	Jumlah Investor	75 Unit Usaha	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1. Penyelenggaraan Promosi Investasi
		Persentase Realisasi Investasi	85 %		2. Temu Usaha dan Seminar Potensi Investasi Kota Balikpapan
		Jumlah Persentase Keluhan Investor	10 %		3. Pembuatan Buku Profil Investasi Kota Balikpapan
		Frekuensi Promosi Investasi	15 Kali		4. Dokumen dan pengarsipan Data
					5. Penilaian Bagi Dunia Usaha
					6. Penyediaan Media Promosi dan Pemutakhiran SIPID
					7. Penyediaan Bahan Materi/Media Informasi Layanan Perizinan dan Investasi
2	Sistem Pelayanan Investasi Berbasis IT	Pelayanan SPIPISE	25 %	Pengendalian dan Pengawasan Investasi	1. Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal dan Investasi di Kota Balikpapan
				Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	2. Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Penanaman Modal dan Investasi di Kota Balikpapan
					3. Kegiatan Optimalisasi Sistem Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Secara Elektronik (SPIPISE)
3	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jumlah permohonan izin	8.450	Pengembangan Pelayanan Perizinan	1. Penyusunan Standart Operasional (SOP) BPMP2T
		Persentase penyelesaian izin	95 %		2. Pengendalian dan Evaluasi Perizinan
		Persentase keluhan pembuatan izin	2%		3. Pembuatan Sarana Kelengkapan Izin Terbit
		Pengembangan pelayanan perizinan berbasis IT	40 %		4. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
					5. Sosialisasi dan Diseminasi Perundang-undangan

				Peningkatan \$Promosi dan Kerjasama Investasi	6. Penyusunan Naskah Akademik
--	--	--	--	---	----------------------------------

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

BPMP2T Kota Balikpapan selaku pelaksana sebagian kebijakan Pemerintah Daerah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian LAKIP BPMP2T Kota Balikpapan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2011 – 2016 maupun Renja Tahun 2013. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Target yang akan dicapai dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2013 meliputi 3 (tiga) sasaran, kalau dilihat pada Tingkat Pencapaian Sasaran yang didasarkan atas pencapaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran, maka secara umum target yang telah dicapai dalam tahun 2013 telah menunjukkan hasil yang baik.

Untuk perbandingan target per sasaran pada pengungkapan kinerja antara Tahun 2012 dan Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**Perbandingan Per Sasaran Kinerja**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2012	Target Tahun 2013
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Invetasi	Jumlah Investor	24 Unit Usaha	75 Unit Usaha
		Persentase Realisasi Investasi	80 %	85 %
		Jumlah Persentase Keluhan Investor	10 %	10 %
		Frekuensi Promosi Investasi	10 Event	15 Event
2	Sistem Pelayanan Investasi Berbasis IT	Pelayanan SPIPISE	5 %	25 %
3	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jumlah permohonan izin	8.400 Pemohon	8.450 Pemohon
		Persentase penyelesaian izin	95 %	95 %
		Persentase keluhan pembuatan izin	3 %	2 %
		Pengembangan pelayanan perizinan berbasis IT	20 %	40 %

Untuk melihat hasil pengungkapan kinerja Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

**Tabel 6**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Invetasi**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Invetasi	Jumlah Investor	75 Unit Usaha	138 Unit Usaha	184 %	Penyelenggaraan Promosi Investasi
		Persentase Realisasi Investasi	85 %	184 %	216 %	Temu Usaha dan Seminar Potensi Investasi Kota Balikpapan
		Jumlah Persentase Keluhan Investor	10 %	15 %	50 %	Pembuatan Buku Profil Investasi Kota Balikpapan
		Frekuensi Promosi Investasi	15 Event	10 Event	66,6 %	1. Dokumen dan Pengarsipan Data 2. Penilaian Bagi Dunia Usaha 3. Penyediaan Media Promosi dan Pemutakhiran SIPID 4. Penyediaan Bahan Materi/Media Informasi Layanan Perizinan dan Investasi

Indikator sasaran peningkatan investasi terkait dengan pengukuran tingkat keberhasilan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan Renstra BPMP2T Kota Balikpapan, maka dapat disampaikan bahwa :

1. Dari jumlah investor yang ditargetkan 75 unit usaha, realisasinya pada akhir Desember 2013 adalah sebesar 138 unit usaha. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 dimana realisasinya adalah sebanyak 68 unit usaha, terjadi penambahan sebesar 70 unit usaha.
2. Dari persentasi realisasi investasi yang ditargetkan sebesar 85 %, realisasinya akhirnya adalah sebesar 184 % untuk tahun 2013.
3. Persentase target keluhan investor pada Tahun 2013 ditargetkan sebesar 10 %. Sedangkan realisasi persentase keluhan investor masih sebesar 15 %, hal ini disebabkan oleh masih panjangnya proses izin investasi sampai ke tahap izin pembangunan fisik.
4. Pada frekuensi promosi investasi yang di targetkan sebesar 15 event promosi, sedangkan realisasi dari event promosinya adalah sebesar 10 event. Hal tersebut dikarenakan adanya efisiensi event promosi investasi yang akan dilaksanakan di beberapa kota.

Tabel 7  
Pengukuran Kinerja Sasaran Sistem Pelayanan Investasi Berbasis IT

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Sistem Pelayanan Investasi Berbasis IT	Pelayanan SPIPISE	25 %	25 %	100 %	1. Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal dan Investasi di Kota Balikpapan 2. Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Penanaman Modal dan Investasi di Kota Balikpapan 3. Kegiatan Optimalisasi Sistem Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Secara Elektronik (SPIPISE) 4. Pengembangan Web Site 5. Pemeliharaan IT Perizinan BPMP2T

Indikator sasaran sistem pelayanan investasi berbasis IT terkait dengan pengukuran tingkat keberhasilan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan RPJMD Kota Balikpapan, maka dapat disampaikan bahwa :

1. Dari pelayanan SPIPISE ditargetkan 25 %, realisasinya akhirnya adalah sebesar 25 %. Jika dilihat pada tahun 2012 sebanyak 25 %, maka pada tahun 2013 masih sama dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia yang terbatas, dan sarana serta prasarana pendukung masih perlu ditingkatkan.

Tabel 8  
Sasaran Peningkatan Pelayanan Perizinan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jumlah permohonan izin	8.450	8.289	98 %	Penyusunan Standart Operasional (SOP) BPMP2T
		Persentase penyelesaian izin	95 %	98 %	103 %	Pengendalian dan Evaluasi Perizinan
		Persentase keluhan pembuatan izin	2 %	2 %	100 %	Pembuatan Sarana Kelengkapan Izin Terbit
		Pengembangan pelayanan perizinan berbasis IT	40 %	45 %	112 %	1. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu 2. Sosialisasi dan Diseminasi Perundang-undangan 3. Penyusunan Naskah Akademik

Indikator sasaran peningkatan pelayanan perizinan terkait dengan pengukuran tingkat keberhasilan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan Renstra BPMP2T Kota Balikpapan, maka dapat disampaikan bahwa :

1. Dari jumlah pemohon izin yang ditargetkan sebanyak 8.450 pemohon, realisasinya sampai akhir Desember 2013 adalah sebesar 8.289 pemohon. Terjadi penurunan sebanyak 161 pemohon atau capaian sebesar 98 %.
2. Dari persentasi penyelesaian izin yang ditargetkan sebesar 95 %, realisasinya pada akhir tahun 2013 adalah sebesar 98 %. Pencapaian ini terjadi karena upaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat senantiasa ditanamkan pada petugas pelayanan, melalui motivasi atau pelatihan peningkatan kualitas SDM.
3. Persentase keluhan pembuatan izin pada Tahun 2013 yaitu 2 %, dan realisasi persentase target keluhan pembuatan izin yaitu sebesar 2 %. Dengan kata lain target untuk menekan keluhan pemohon dapat dicapai.

4. Pada pengembangan pelayanan perizinan berbasis IT, di tahun 2013 di targetkan sebesar 40 %, sedangkan realisasi dari pengembangan pelayanan perizinan berbasis IT adalah sebesar 45 %. Atau terjadi pencapaian sebesar 112 % terkait dari pengembangan pelayanan perizinan berbasis IT yang kedepannya diharapkan mampu meningkatkan pelayanan terpadu di Kota Balikpapan.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Balikpapan meliputi :

1. Tidak tercapainya penurunan persentase keluhan dikarenakan proses perizinan masih diperlukan rekomendasi dari beberapa SKPD, sehingga terkesan prosesnya terlalu panjang.
2. Jumlah proses perizinan masih 14 hari. Karena semua proses perizinan belum diserahkan semuanya ke BPMP2T.
3. SDM PNS yang masih kurang.

## **B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2013**

Realisasi anggaran dan kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- a. Pagu Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 10.970.534.000,- (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) yang terdiri dari :

- Belanja Langsung Rp. 7.554.276.000,-
- Belanja Tidak Langsung Rp. 3.416.258.000,-

Dengan rincian :

- Belanja Pegawai Rp. 4.983.013.000,-
- Belanja Barang Rp. 4.698.931.400,-
- Belanja Modal Rp. 1.288.589.600,-

- b. Realisasi Anggaran pada per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 8.278.411.387,- (Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) atau 75,46 % dari pagu anggaran, dengan rincian :

- Belanja Pegawai Rp. 3.935.684.134,- (78,98 %)
- Belanja Barang Rp. 3.330.398.355,- (70,87 %)

- Belanja Modal Rp. 1.012.328.898,- (78,56 %)

Adapun pengungkapan keuangan per sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 9  
Pengungkapan Keuangan Per Sasaran Kinerja Tahun 2013

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target/Pagu Dana Indikatif (dalam Rp.)	Realisasi (dalam Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Investasi	Jumlah Investor	1.711.261.800,-	1.465.343.650,-	85,63
		Persentase Realisasi Investasi	186.850.000,-	163.058.400,-	87,27
		Jumlah Persentase Keluhan Investor	123.540.000,-	122.573.400,-	99,22
		Frekuensi Promosi Investasi	420.655.200,-	356.657.650,-	84,78
2	Sistem Pelayanan Investasi Berbasis IT	Pelayanan SPIPISE	607.471.200,-	403.048.280,-	66,34
3	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jumlah permohonan izin	151.004.000,-	0,-	0
		Persentase penyelesaian izin	50.342.300,-	9.159.200,-	18,19
		Persentase keluhan pembuatan izin	156.915.000,-	107.492.500,-	68,50
		Pengembangan pelayanan perizinan berbasis IT	1.189.197.150,-	549.404.800,-	46,19

Melihat dari indikator sasaran kinerja BPMP2T Kota Balikpapan Tahun 2013 terkait dengan pengukuran akuntabilitas keuangan, maka dapat disampaikan bahwa :

1. Dari sasaran Peningkatan Investasi, pagu dana indikatif adalah sebesar Rp. 2.442.307.000,-. Sedangkan untuk realisasi keuangannya adalah sebesar Rp. 2.107.633.100,- dengan persentase realisasi sebesar 87 %. Hal tersebut dikarenakan efisiensi dari perjalanan dinas luar daerah, dan adanya pemanfaatan event-event promosi yang pelaksanaannya bisa diminimalkan, namun tetap menjaring investor untuk berinvestasi di Kota Balikpapan sebagai kota jasa, industri, perdagangan dan pariwisata.
2. Dari sasaran Sistem Pelayanan Investasi Berbasis IT, pagu dana indikatif adalah sebesar Rp. 607.471.200,-. Sedangkan untuk realisasi keuangannya adalah sebesar Rp. 403.048.280,- dengan persentase realisasi sebesar 66,34 %. Hal tersebut dikarenakan adanya efisiensi waktu dari kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang seharusnya dilaksanakan dalam beberapa hari bisa diminimalkan namun tidak mengurangi hasil dari sasaran dimaksud.

3. Dari sasaran Peningkatan Pelayanan Perizinan, pagu dana indikatif adalah sebesar Rp. 1.547.458.450,-. Sedangkan untuk realisasi keuangannya adalah sebesar Rp. 666.056.500,- dengan persentase realisasi sebesar 43 %. Hal tersebut dikarenakan pada indikator kinerja jumlah permohonan izin ada 2 (dua) kegiatan yang tidak terealisasi yaitu pada kegiatan Penyusunan Standar Operasional (SOP) BPMP2T Kota Balikpapan, pengerjaannya sudah menjadi tugas pokok dan pelaksanaannya telah dilaksanakan langsung oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Balikpapan. Selanjutnya pada kegiatan Penyusunan Naskah Akademik tidak terealisasi keuangan dikarenakan kegiatan tersebut mengalami gagal tayang dan diajukan kembali pada tahun anggaran selanjutnya.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

LAKIP Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Balikpapan Tahun 2013 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2013, dan implementasinya disesuaikan dengan arahan Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016, Renstra dan Renja BPMP2T Kota Balikpapan.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan serta mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran 2013 secara umum telah tercapai, demikian pula mengenai verifikasi terhadap Indikator Output dan Outcome dari masing-masing Indikator Kinerja telah mempunyai keterkaitan dengan Program dan Sasaran Strategis.

Capaian kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Balikpapan sangat dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

### **B. SARAN**

1. Membuatkan jadwal setiap kegiatan yang dilaksanakan secara konsisten oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran, sehingga penyerapan anggaran bisa lebih maksimal dan tepat waktu.
2. Mengusulkan rekrutmen pegawai melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan.
3. Mengikutkan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan baik fungsional maupun yang lainnya dalam menambah pengetahuan dan keahlian pegawai tersebut dalam meningkatkan produktivitas pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan.

4. Mempercepat penyelesaian dokumen-dokumen pertanggungjawaban kegiatan yang telah diselesaikan oleh masing-masing PPTK.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan sumber daya yang ada pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan berusaha memenuhi kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 ini sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditetapkan.

Balikpapan, 27 Pebruari 2014

Kepala Badan Penanaman Modal dan  
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan,



*Nining Surtiningsih*

**NINING SURTINGSIH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590404 198302 2 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013  
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KOTA BALIKPAPAN**

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*good governance*), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NINING SURTININGSIH**

Jabatan : **KEPALA BPMP2T KOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H.M. RIZAL EFFENDI**

Jabatan : **WALIKOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji :

1. mewujudkan target kinerja tahun 2013 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan anggaran;
2. mewujudkan Balikpapan sebagai kawasan Zona Integritas melalui :
  - a. Komitmen SKPD yang bersih dan bebas KKN;
  - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan disiplin aparatur serta ternib administrasi pada SKPD.
3. menyampaikan laporan pelaksanaan target kinerja sebagaimana point 1 dan 2 per 3 bulan kepada Walikota.

Indikator capaian sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 di atas adalah terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lembar perjanjian ini.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama dan pihak pertama bersedia menerima sanksi atas kegagalan dalam pencapaian kinerja.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 14 Januari 2013

Pihak Kedua,

**H.M. RIZAL EFFENDI**

Pihak Pertama,

**NINING SURTININGSIH**



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
(BPMP2T)**

Jl. RE. Martadinata No. 01 Rt. 52 Telp. (0542) 416968 Fax. (0542) 416969  
Website : www.balikpapan-investment.com e-mail : bpmpt\_bpp@yahoo.com  
BALIKPAPAN

Kode Pos 76100

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU KOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR : 188.46/ 01 /BPMP2T**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BALIKPAPAN  
TAHUN 2011-2016**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang termuat dalam RENSTRA Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan tahun 2011-2016, maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
  - b. bahwa dalam rangka penguatan terhadap RENSTRA Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan tahun 2011-2016 maka diperlukan penetapan indikator kinerja utama sasaran strategis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
  - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Kota Balikpapan;
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan;
11. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan;
12. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan kurun waktu 2011-2016 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

Kedua : Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
1.	Peningkatan Investasi	Jumlah Investor	Bidang Penanaman Modal
		Persentasi Realisasi Investasi	Bidang Penanaman Modal
		Persentasi Realisasi Investor	Bidang Penanaman Modal
		Frekwensi Promosi Investasi	Bidang Penanaman Modal
		Pelayanan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Bidang Penanaman Modal
2.	Sistem Pelayanan Investasi Berbasis Informasi Teknologi (IT)	Jumlah Pemohon Izin	Bidang Perizinan
		Persentasi Penyelesaian Izin	Bidang Perizinan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
3.	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentasi Keluhan Pembuatan Izin  Pengembangan Pelayanan Perizinan Berbasis Informasi Teknologi (IT)	Bidang Perizinan  Bidang Perizinan

Ketiga : Unit kerja di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang diatur dalam Keputusan ini.

Keempat : Apabila didalam penetapan keputusan ini terdapat kesalahan atau kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 3 Januari 2014

Kepala Badan Penanaman Modal dan  
Pelayanan Perizinan Kota Balikpapan,



**NINING SURTININGSIH**  
Rembina Utama Muda  
NIP.19590404 198302 2 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Balikpapan
2. Inspektur Inspektorat Kota Balikpapan
3. Kepala Bappeda Kota Balikpapan
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Balikpapan

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. NAMA UNIT ORGANISASI : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Balikpapan
2. TUGAS : Melaksanakan perumusan, pengendalian dan pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang Didelegasikan Secara Terpadu
3. INDIKATOR KINERJA UTAMA : Investasi dan Pelayanan Perizinan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN/SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Peningkatan Investasi	Jumlah Investor	Bidang Penanaman Modal
		Persentase Realisasi Investasi	Bidang Penanaman Modal
		Persentase Keluhan Investor	Bidang Penanaman Modal
		Frekwensi Promosi Investasi	Bidang Penanaman Modal
2	Sistem Pelayanan Investasi Berbasis IT	Pelayanan SPIPISE	Bidang Penanaman Modal
3	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jumlah Pemohon Izin	Bidang Perizinan
		Persentase Penyelesaian Izin	Bidang Perizinan
		Persentase Keluhan	Bidang Perizinan
		Pembuatan Izin	
		Pengembangan Pelayanan Perizinan Berbasis IT	Bidang Perizinan

Balikpapan, 3 Januari 2014

Kepala BPMP2T Kota Balikpapan



NINING SURTINGSIH

Pembina Utama Muda

NIP. 19590404 198302 2 005

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KOTA BALIKPAPAN

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Investasi	Peningkatan Investasi	Jumlah Investor	82	92	104
			Prosentasi Realisasi Investasi	90%	100%	100%
			Prosentasi Keluhan Investor	8%	5%	0
			Frekwensi Promosi Investasi	15	25	25
		Sistem Pelayanan Investasi Berbasis IT	Pelayanan SPIPISE	50%	75%	100%
2	Meningkatkan Pelayanan Perizinan	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jumlah Pemohon Izin	8,500	8,500	8,500
			Prosentasi Penyelesaian Izin	95%	95%	95%
			Prosentasi Keluhan Pembuatan Izin	1%	0	0
			Pengembangan Pelayanan Perizinan Berbasis IT	60%	80%	100%

Balikpapan, 3 Januari 2014

Kepala BPMP2T Kota Balikpapan,



**NINING SURTININGSIH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19590404 198302 2 005

**PENGUKURAN KINERJA SKPD  
TAHUN 2013**

Unit Kerja : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
Tahun : 2013

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi Keuangan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Peningkatan Investasi					<b>Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi</b>			
					Penyelenggaraan Promosi Investasi	Rp	1,465,343,650	85.63
					Temu Usaha dan Seminar Potensi Investasi Kota Balikpapan	Rp	163,058,400	87.27
					Penilaian Bagi Dunia Usaha	Rp	49,072,900	89.72
					Frekuensi Promosi Investasi	15 Event	10 Event	66,6%
					Penyediaan Bahan/Materi/Media Informasi Layanan Perizinan dan Investasi	Rp	85,879,000	98.94
Sistem Pelayanan Investasi Berbasis IT	Pelayanan SPIPISE	25%	25%	100%	<b>Program Peningkatan Promosi Investasi</b>			
					Pembuatan Buku Profil Investasi Kota Balikpapan	Rp	122,573,400	99.22
					<b>Program Pengembangan dan Pengawasan Investasi</b>			
					Pengendalian dan Pengawasan Perizinan	Rp	9,159,200	18.19
					<b>Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi</b>			
Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal dan Investasi di Kota Balikpapan	Rp	159,064,750	66.28					
Kegiatan Optimalisasi Sistem Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Secara Elektronik (SPIPISE)	Rp	77,759,400	62.12					
Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jumlah Pemohon Izin	8.450	8.289	98%	<b>Program Peningkatan Promosi Investasi</b>			
					Dokumentasi dan Pengarsipan Data	Rp	97,014,150	97.02
					Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah	Rp	310,043,800	0
					<b>Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi</b>			
					Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Penanaman Modal dan Investasi di Kota Balikpapan	Rp	55,863,850	57.86
Persentase Penyelesaian Izin		95%	98%	103%	<b>Program Peningkatan Promosi Investasi</b>			
					Pengembangan Website Informasi dan Pengaduan	Rp	54,610,180	63.84
					Pemeliharaan IT Perizinan BPMP2T	Rp	53,750,100	94.70
Persentase Keluhan Pembuatan Izin	Persentase Keluhan Pembuatan Izin	2%	2%	100%	<b>Program Pengembangan dan Pengawasan Investasi</b>			
					Pembuatan Sarana Kelengkapan Izin Terbit	Rp	107,492,500	68.50
					Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu	Rp	463,829,800	60.49
					Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan-Peraturan dan Pelayanan Perizinan	Rp	85,575,000	76.16
					<b>Program Penyiapan Potensi Sumber daya, Sarana dan Prasarana Daerah</b>			
Peningkatan SDM/Bimtek Aparatur	Rp	266,222,500	84.00					
Pengembangan Pelayanan Perizinan Berbasis IT	40%	45%	112%	Penyusunan Standart Operasional Prosedur BPMP2T Kota Balikpapan	Rp	151,004,000	0	

Balikpapan, 5 Januari 2014  
Kepala BPMP2T Kota Balikpapan  
  
**NINING SURTINGSIH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590404 198302 2 005